

MEDIATOR

Pjs. Bupati Solok Hadiri Workshop Uji Coba Aplikasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

JIS Sumbar - SUMBAR.MEDIATOR.CO.ID

Oct 19, 2024 - 17:21



JAKARTA – Pjs. Bupati Solok, Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, menghadiri kegiatan Workshop Uji Coba Aplikasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang berlangsung di Orchardz Hotel Jayakarta pada Jumat, 18 Oktober 2024. Kehadiran Akbar Ali dalam acara ini bukan hanya sebagai Pjs. Bupati Solok, tetapi juga sebagai “tuan rumah” karena ia menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN

Kemendagri.

IKKD merupakan satuan ukuran yang diinisiasi oleh BSKDN Kemendagri untuk menilai kepemimpinan kepala daerah melalui seperangkat variabel, dimensi, dan indikator. Sistem ini bertujuan untuk mengawal kinerja pimpinan daerah sekaligus memastikan tersedianya data dan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Kualitas kepemimpinan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran IKKD bertujuan untuk mengawasi kinerja kepemimpinan kepala daerah,” ujar Akbar Ali saat memberikan sambutan.

Pengukuran IKKD terdiri dari dua variabel utama, yaitu kinerja pemerintah daerah dan kepemimpinan kepala daerah. Dimensi yang dinilai mencakup kinerja pembangunan ekonomi dan sosial, penerimaan penghargaan pembangunan, kinerja kepemimpinan birokrasi, serta kinerja kepemimpinan politik dan sosial, dengan masing-masing dimensi diberi bobot nilai tertentu.

Di penghujung acara, Akbar Ali menjelaskan bahwa pihaknya masih terus berupaya menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD, termasuk menyesuaikan bobot nilai. Ia menekankan pentingnya agar hasil pengukuran IKKD sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya terlihat dari dokumen administratif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Walaupun pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan baru akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini mempertimbangkan sensitivitas menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024,” pungkasnya.

Workshop ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia, dengan pengukuran yang lebih objektif dan akurat melalui aplikasi IKKD.